

KABUPATEN
BOLAANG
MONGONDOW
UTARA



RENJA

BAPELITBANG

2024

DAFTAR ISI DAN DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB	I	PENDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	3
	1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB	II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2022 dan Capaian Renstra	5
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda	8
	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024	12
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .	19
BAB	III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	20
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
	3.2	Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi	21
	3.3	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	21
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	23
BAB	V	PENUTUP	25

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kinerja Sasaran Bapelitbangda Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022	7
Tabel 2.2	Kinerja Program Bapelitbangda Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022	7
Tabel 2.3	inerja Anggaran Bapelitbangda Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022	8
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbangda s.d Tahun 2022	9
Tabel 2.5	Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024	13
Tabel 3.1	Permasalahan Bapelitbangda Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat/Pendorongnya	20
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bapelitbang Tahun 2024	22
<i>Lampiran:</i>	• Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bapelitbangda s.d tahun 2023 • Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 • Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bapelitbangda Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bapelitbangda Bolaang Mongondow Utara disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Renstra Bapelitbangda Bolaang Mongondow Utara, serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/Bappenas dan Renja Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.

Proses penyusunan Renja Bapelitbangda Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Bapelitbangda 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun transisi sehingga Renja Bapelitbangda berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026. Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor)
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor ,...);
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor ...);

12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor ...).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bapelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan dari Renja Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2020 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA, berisi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dan Capaian Renstra Bappeda, Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda, Isu – Isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPELITBANG, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi Tujuan dan Sasaran, Rencana Program, Kegiatan Bappeda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPELITBANGDA, berisi Rencana Program, Kegiatan Bappeda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA

Berdasarkan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022, Bapelitbangda mendukung pencapaian sasaran daerah *"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan"* dengan prioritas daerah *"Penyederhanaan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik"*. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bapelitbangda melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan pada Urusan Pemerintahan. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 melaksanakan 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA
 - c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- a. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan Teknologi dan Inovasi
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Pengukuran kinerja Bapelitbangda didasarkan pada sasaran, program dan keuangan, sebagaimana pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1

Kinerja Sasaran Bapelitbangda Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Penataan Administrasi Perkantoran	Persentase pengelolaan administrasi yang baik (persen)	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai perencanaan kinerja (persen)	19,00	23,13	121,73
	Nilai pengukuran kinerja (persen)	16,50	14,53	88,06
Meningkatnya capaian target pembangunan	Nilai pencapaian kinerja(persen)	18,50	9,77	52,81

Sumber : Sekretariat Bapelitbangda, 2023

Tabel 2.2

Kinerja Program Bapelitbangda Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

Program Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	100,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	70,00	92,67	102,96
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbang yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja daerah	90,00	5,00	5,55

Sumber : Sekretariat Bapelitbangda, 2023

Tabel 2.3

Kinerja Anggaran Bapelitbangda Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

Alokasi Anggaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sisa Lebih	Tingkat Realisasi
(1)	(2)	(3)	(3)
6.924.780.874,00	6.637.947.501,00	286.833.373,00	95,86

Sumber : Sekretariat Bapelitbangda, 2023

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Bapelitbangda Bolaang Mongondow Utara sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada *lampiran 1*.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem e-Planning yang terintegrasi e-Budgeting yang di damping oleh *Tim Penyelia* Bapelitbang membantu kerja bidang-bidang di Bapelitbangda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan PD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPELITBANGDA

Pada tahun 2022 Bepelitbangda telah melaksanakan 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap Perangkat Daerah, sehingga capaiannya 100,00 persen karena pelaksanaan program ini mutlak dilakukan oleh semua perangkat daerah untuk menunjang pelaksanaan Tusi.

2. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dengan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan program yang berisikan kegiatan implementasi e-Planning (SIPD) dan e-Budgeting (FMIS), dimana kedua aplikasi ini wajib diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran. Kondisi ini menyebabkan capain kinerja pada indikator program ini adalah 100,00 persen pada tahun 2022.

3. Persentase Capaian Kinerja SKPD

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan berisikan kegiatan pendampingan, asistensi, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan SKPD yang menjadi kesatuan dalam meningkatkan capaian kinerja SKPD. Adapun capaian kinerja indikator program ini adalah 92,67 persen atau 102,96 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada 2022 yang hanya sebesar 70,00 persen.

4. Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dapat Digunakan Untuk Meningkatkan Kinerja Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sedikit mengalami *anomaly* terhadap capaiannya, dimana dari target 90,00 persen, hanya 5,00 persen hasil kelitbangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja daerah pada tahun 2022. Kondisi ini diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan sumber daya manusia untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan isu pembangunan daerah. disisi lain, keberpihakan kebijakan penganggaran dalam kelitbangan perlu ditingkatkan, mengingat reformasi birokrasi menuntut adanya peningkatan pelayanan yang efektif dan efisien melalui digitalisasi dan inovasi pelayanan publik.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbangda s.d Tahun 2022

Indikator	Sat	Target PD pada Tahun ke-				Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Indikator Kinerja Kunci													
Ketersediaan Renstra SKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketersediaan Renja SKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketersediaan RKA SKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah prog RKPD dalam Renja SKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah prog Renja dalam RKA SKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indikator Kinerja Utama													

Indikator	Sat	Target PD pada Tahun ke-				Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
perencanaan kinerja	%	13,00	15,00	17,00	19,00	21,66	21,74	21,95	23,13	1,67	1,45	1,29	1,22
pengukuran kinerja	%	12,00	13,50	15,00	16,50	12,86	13,12	13,35	14,53	1,07	0,97	0,89	0,88
pencapaian kinerja	%	14,00	15,50	17,00	18,50	9,52	10,02	9,77	13,75	0,68	0,65	0,57	0,74
Persentase pengelolaan administrasi yang baik (persen)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indikator Kinerja Program													
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase capaian kinerja SKPD	%	60,00	65,00	67,00	70,00	60,00	65,00	67,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase hasil kelitbangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja daerah	%	60,00	70,00	80,00	90,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sekretariat Bapelitbangda, 2023

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bapelitbangda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bapelitbangda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bapelitbangda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari dua urusan,

yaitu perencanaan dan kelitbangan yang mengandung 4 (empat) permasalahan inti sebagaimana berikut:

1. **Belum optimalnya koordinasi, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan**

Koordinasi belum bisa optimal dikarenakan sistem komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan belum terbangun dengan baik. Selain itu, jadwal sistem perencanaan pembangunan dan upaya pelaksanaan pembangunan belum mengacu dokumen perencanaan secara konsisten. Keselarasan antara permasalahan, dokumen perencanaan dan pelaksanaan juga belum bisa optimal dalam menyelesaikan tantangan pembangunan di ranah masyarakat Bolaang Mongondow Utara sehingga sinkronisasi perencanaan juga belum optimal.

2. **Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan**

Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan terlihat dari hasil kinerja perangkat daerah yang belum sepenuhnya tercapai sesuai target. Disamping itu, tidak adanya evaluasi secara berkala dan pengendalian terhadap perangkat daerah menyebabkan banyak program/kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. **Belum optimalnya basis data perencanaan pembangunan daerah**

Penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan biasanya dilaksanakan pada triwulan I pada tahun n untuk penyusunan dokumen tahun $n+1$. Penyediaan data kondisi tahun $n-1$ adalah data yang paling mutakhir yang dapat disediakan oleh perangkat daerah, tidak jarang penyediaan data ini pun agak mundur dari tenggat waktu yang ditetapkan sehingga dapat menghambat proses penyusunan dokumen perencanaan.

Disamping itu, data yang dihasilkan dari perangkat daerah selaku produsen data yang kemudian dikompilasi terkadang belum sesuai harapan. Belum optimalnya Forum Satu Data Indonesia juga memperburuk kondisi ini.

4. **Belum optimalnya penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan**

Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. Selain itu, belum ada sumber daya manusia

ASN fungsional peneliti yang secara khusus melakukan kajian-kajian untuk menjawab permasalahan daerah dari sudut pandang kepakaran.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bapelitbangda di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bapelitbangda dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan adalah:

1. Perubahan regulasi dan lingkungan eksternal yang begitu cepat berimplikasi pada fleksibilitas perencanaan di daerah;
2. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan;
3. Permasalahan akurasi, kebaruan data, dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja dalam satu sistem terpadu;
4. Terbatasnya kajian yang dimanfaatkan sebagai basis pengambilan kebijakan dan perencanaan;
5. Belum optimalnya SDM Bapelitbangda dengan kualitas dan kompetensi yang memadai untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan.

Disisi lain, peluang yang dimiliki Bapelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

1. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mengimplementasikan e-Planning agar terintegrasi dengan e-Budgeting (SIPD/Simda Next-G) sebagai antisipasi dinamika regulasi dalam upaya untuk meningkatkan integrasi pengelolaan sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan;
2. Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder untuk penyediaan data yang dibutuhkan;
3. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dari kementerian dan lembaga yang kompeten
4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan yang terukur dan jelas.

Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2024

Rancangan awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bapelitbangda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	3.232.225,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	3.232.225,25
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00	148.743,92	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00	148.743,92
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4,00	79.992,31	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4,00	79.992,31
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7,00	68.751,61	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7,00	68.751,61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00	2.366.742,67	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00	2.366.742,67
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji/tunj	20,00	2.366.742,67	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji/tunj	20,00	2.366.742,67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00	136.259,06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	81,00	136.259,06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	81,00	136.259,06
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100,00	235.828,66	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100,00	235.828,66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7,00	34.003,14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7,00	34.003,14

RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	28,00	11.614,30	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	28,00	11.614,30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29,00	190.211,21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29,00	190.211,21
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	61.479,52	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	61.479,52
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	14,00	61.479,52	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	14,00	61.479,52
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	117.782,21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	117.782,21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4,00	17.051,47	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4,00	17.051,47
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	4,00	100.730,74	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	4,00	100.730,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	165.389,22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	165.389,22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15,00	87.690,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15,00	87.690,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26,00	15.200,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26,00	15.200,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1,00	62.499,22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1,00	62.499,22
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian target perencanaan pembangunan daerah (persen)	74,00	638.421,16	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian target perencanaan pembangunan daerah (persen)	74,00	638.421,16
	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan (persen)	100,00	130.091,59		Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan (persen)	100,00	130.091,59
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu (persen)	100,00	509.845,16	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu (persen)	100,00	509.845,16
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rantek RPJMD/ ranwal RKPD (dokumen)	3,00	164.657,37	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rantek RPJMD/ ranwal RKPD (dokumen)	3,00	164.657,37
Koordinasi Penelaahan Dokrenda dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (dokumen)	1,00	54.532,10	Koordinasi Penelaahan Dokrenda dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (dokumen)	1,00	54.532,10
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara Konsultasi Publik	3,00	45.631,56	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara Konsultasi Publik	3,00	45.631,56
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD	Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	3,00	21.545,21	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD	Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	3,00	21.545,21
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota (berita acara)	3,00	40.053,62	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota (berita acara)	3,00	40.053,62
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (dokumen)	2,00	183.425,30	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (dokumen)	2,00	183.425,30

RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran (persen)	100,00	130.091,59	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran (persen)	100,00	130.091,59
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (laporan)	8,00	130.091,59	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (laporan)	8,00	130.091,59
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama	Terkendalnya pelaksanaan kerja sama daerah	-	-	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama	Terkendalnya pelaksanaan kerja sama daerah	-	-
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Capaian Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah (persen)	100,00	128.576,00	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Capaian Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah (persen)	100,00	128.576,00
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (dokumen)	4,00	128.576,00	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (dokumen)	4,00	128.576,00
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%)	94,58	657.734,10	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%)	94,58	657.734,10
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kinerja OPD bidang Pemerintahan dan PM (persen)	95,51	353.009,05	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kinerja OPD bidang Pemerintahan dan PM (persen)	95,51	164.433,52
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah SKPD yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan SKPD (SKPD)	16,00	24.488,87	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah SKPD yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan SKPD (SKPD)	0,00	0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan SKPD Bidang Pemerintahan (laporan)	1,00	47.955,48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan SKPD Bidang Pemerintahan (laporan)	0,00	0,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	1,00	86.112,76	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	0,00	0,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia (SKPD)	7,00	10.713,88	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia (SKPD)	0,00	0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7,00	64.283,28	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	0,00	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (laporan)	1,00	119.454,78	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (laporan)	2,00	164.433,52
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kinerja OPD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (persen)	95,54	164.171,09	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kinerja OPD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (persen)	95,54	131.546,82
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian (SKPD)	6,00	9.183,33	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian (SKPD)	0,00	0,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (SKPD)	6,00	55.099,96	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (SKPD)	0,00	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (laporan)	1,00	99.887,81	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (laporan)	1,00	131.546,82
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kinerja OPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)	92,70	140.553,95	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kinerja OPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)	92,70	140.553,95
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (SKPD)	6,00	8.542,66	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (SKPD)	36,00	230.206,93
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (laporan)	6,00	51.255,96	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (laporan)	0,00	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)	1,00	80.755,33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)	2,00	131.546,82
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi/p enelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah (persen)	0,63	294.883,69	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi/ penelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah (persen)	0,63	294.883,69

RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase kematangan inovasi (persen)	83,33	285.588,20		Persentase kematangan inovasi (persen)	83,33	285.588,20
Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase pemenuhan indikator inovasi daerah (persen)	87,01	285.588,20	Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase pemenuhan indikator inovasi daerah (persen)	87,01	285.588,20
Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi dibidang difusi, inovasi dan penerapan teknologi (laporan)	1,00	285.588,20	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi dibidang difusi, inovasi dan penerapan teknologi (laporan)	1,00	285.588,20
Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah penelitian yang dihasilkan (dokumen)	2,00	294.883,69	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah penelitian yang dihasilkan (dokumen)	2,00	294.883,69
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik (laporan)	2,00	294.883,69	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik (laporan)	2,00	294.883,69

Sumber : Sekretariat Bapelitbangda, 2023

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Namun begitu, perbedaan pada besaran anggaran per kegiatan maupun rinciannya belum mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan mungkin akan terjadi pada saat penyusunan draft kebijakan umum anggaran untuk tahun 2024, dimana besaran alokasi dana transfer maupun dana lainnya dari pemerintah pusat dan provinsi telah ditetapkan sehingga berimplikasi kepada postur APBD secara umum.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Bapelitbangda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pada Pemerintah Pusat, kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Pertama, menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kedua, mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam mewujudkan visi tersebut, Bappenas melakukan tindakan nyata dalam bentuk dua misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Tabel 3.1

Permasalahan Bapelitbangda Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat/Pendorongnya

Sasaran Strategis Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bapelitbangda Bolmut	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Belum terintegrasinya SIPD dengan sistem penganggaran yang ada	Masih banyak program/ kegiatan OPD yang belum selaras dengan prioritas daerah	Mekanisme desk dalam tahapan dan asistensi dokren SKPD
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan	Minimnya hasil pengendalian pembangunan yang dijadikan dasar perencanaan pembangunan	Pengendalian program/ kegiatan pembangunan belum dilaksanakan dengan optimal	Komitmen Kepala Bapelitbangda untuk meningkatkan peran strategis perencanaan pembangunan daerah
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Belum efektifnya perencanaan pembangunan untuk mengatasi permasalahan daerah	Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Bapelitbangda	Peran strategis "Tim Penyelia" untuk menjaga koordinasi antara bidang pengampu SKPD.

Sumber : Sekretariat Bapelitbangda, 2023

3.2. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI

Dalam penyusunan Renja Bapelitbangda Tahun 2024, belum dilakukan penelaahan terhadap Renja Bappeda Provinsi Sulawesi Utara sehubungan Renja Bappeda Provinsi Sulawesi Utara masih dalam tahap perumusan dan belum dapat dijadikan rujukan. Penelaahan akan dilakukan setelah rancangan akhir Renja Bappeda Provinsi Sulawesi Utara telah disusun dan sebelum RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 ditetapkan.

3.3. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2024 merupakan tahun transisi bagi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana periode RPJMD sebelumnya telah selesai pada tahun ini (2023) dan disisi lain pemilihan KDH/WKDH mengikuti kebijakan Pilkada Serentak pada 2024 mendatang. Untuk mengisi kekosongan tersebut, ditetapkanlah Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) yang selanjutnya menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD tahun 2024-2026.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bapelitbang Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
		Tahun 2024	Renstra (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) (predikat)	B	BB
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Opini BPK) (predikat)	WTP	WTP
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	80,50	83,98
Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah	Nilai LKjIP SKPD (predikat)	B	BB
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	Tidak Ada	Tidak Ada
Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	Nilai perencanaan kinerja (max. 30%)	24,22	25,00
	Nilai pengukuran kinerja (max. 25%)	17,27	20,00
	Nilai pencapaian kinerja (max. 20%)	12,39	15,00
Meningkatkan kualitas kelitbang untuk mendukung kebijakan daerah	Persentase kebijakan daerah yang dihasilkan dari penelitian (persen)	8,33	11,86
	Indeks Inovasi Daerah (poin)	45,22	48,22

Sumber : Sekretariat Bapelitbangda, 2023

Formula perhitungan:

- Nilai AKIP : Hasil rilis Kemenpan RB setiap tahunnya
- Opini BPK : Opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya

- Nilai IKM : Hasil rilis Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Nilai LKjIP SKPD : Hasil rilis Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Jumlah temuan hasil pemeriksaan oleh BPK : Jumlah temuan administrative yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKPD setiap tahunnya.
- Nilai perencanaan kinerja (max. 30%) : Nilai komponen perencanaan kinerja dalam perhitungan AKIP setiap tahunnya
- Nilai pengukuran kinerja (max. 25%) : Nilai komponen pengukuran kinerja dalam perhitungan AKIP setiap tahunnya
- Nilai pencapaian kinerja (max. 20%) : Nilai komponen pencapaian kinerja dalam perhitungan AKIP setiap tahunnya
- Persentase kebijakan daerah yang dihasilkan dari penelitian : Jumlah kebijakan daerah dalam RKPD hasil Penelitian dibagi jumlah kebijakan daerah yang tercantum dalam RKPD dikali seratus persen
- Indeks Inovasi Daerah : Hasil rilis Kemendagri setiap tahunnya

Perumusan program dan kegiatan di Bapelitbangda Bolaang Mongondow Utara didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian sasaran daerah "*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan*" dengan prioritas daerah "*Penyederhanaan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik*". Rencana kerja Bapelitbangda tahun 2024 mencakup 4 (empat) program terdiri 15 (lima belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama
- c. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Rumusan rencana program dan kegiatan Bapelitbangda tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada *lampiran 2*.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bapelitbangda Tahun 2024 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun pertama, periode renstra 2024-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai target kinerja RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh jajaran Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Boroko, April 2023

KEPALA BAPELITBANGDA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA



AROMAN TALIBO, S. Pt

NIP. 19710701 200212 1 007

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPELITBANGDA s.d TAHUN 2024

Nomor	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Akhir Periode (2023)	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2024		Realisasi terhadap Renstra
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	Target	Realisasi s.d 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan pelaksanaan tugas ASN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	60.00	30.00	-	-	-	-	30.00	50.00
1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan yang diikuti/dilaksanakan	51.00	8.00	10.00	5.00	50.00	10.00	23.00	45.10
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	19.00	3.00	5.00	25.00	500.00	5.00	33.00	173.68
1.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah/jenis barang cetak/penggandaan yang diadakan	53.00	3.00	10.00	7.00	70.00	10.00	20.00	37.74
1.3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	329.00	34.00	60.00	75.00	125.00	60.00	169.00	51.37
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100.00	100.00	100.00	71.43	71.43	100.00	100.00	100.00
1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang diadakan	5.00	1.00	1.00	-	-	1.00	2.00	40.00
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan	19.00	5.00	14.00	10.00	71.43	14.00	29.00	152.63
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Nomor	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Akhir Periode (2023)	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2024		Realisasi terhadap Renstra
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	Target	Realisasi s.d 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan mesin lainnya yang terpelihara	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi/dipelihara	2.00	1.00	1.00	1.00	100.00	-	2.00	100.00
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.1.1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	14.00	3.00	3.00	4.00	133.33	3.00	10.00	71.43
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Persentase dokrenda yang disusun melalui pengembangan IT	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan berbasis IT yang dikembangkan	2.00	1.00	2.00	2.00	100.00	2.00	5.00	250.00
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	88.00	84.00	88.00		-	88.00	88.00	100.00
2.3.1	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama yang dikembangkan dalam rangka peanekaragaman data	1.00	1.00	1.00	-	-	1.00	2.00	200.00
2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan berkala pelaksanaan dokren yang disusun	27.00	9.00	5.00	5.00	100.00	5.00	19.00	70.37
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja SKPD	75.00	67.00	75.00		-	75.00	142.00	189.33
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian kinerja SKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	80.00	70.00	80.00		-	80.00	80.00	100.00

Nomor	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Akhir Periode (2023)	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2024		Realisasi terhadap Renstra
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	Target	Realisasi s.d 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.1.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen sektoral bidang pemerintahan yang disusun	3.00	2.00	-	-	-	-	2.00	66.67
3.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah asistensi penyusunan dokren SKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dilakukan	12.00	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	6.00	50.00
3.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen sektoral bidang pembangunan manusia yang disusun	5.00	3.00	-	-	-	-	3.00	60.00
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata capaian kinerja SKPD lingkup bidang perekonomian dan SDA	85.00	80.00	85.00	85.00	100.00	85.00	85.00	100.00
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPTMD dan RKPD)	Jumlah dokumen sektoral bidang perekonomian yang disusun	6.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	3.00	50.00
3.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah asistensi penyusunan dokren SKPD bidang perekonomian yang dilakukan	12.00	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	6.00	50.00
3.2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen sektoral bidang SDA yang disusun	5.00	2.00	1.00	1.00	100.00	1.00	4.00	80.00
3.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen sektoral bidang SDA yang disusun	3.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	3.00	100.00
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata capaian kinerja SKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	80.00	70.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	100.00
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPTMD dan RKPD)	Jumlah dokumen sektoral bidang infrastruktur yang disusun	5.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	3.00	60.00
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja daerah	90.00	70.00	90.00		-	90.00	90.00	100.00
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	3.00	300.00

Nomor	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Akhir Periode (2023)	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2024		Realisasi terhadap Renstra
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	Target	Realisasi s.d 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1.1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah penelitian yang dihasilkan	4.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	3.00	75.00
4.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi yang dikembangkan	18.18	18.18	1.00	1.00	100.00	-	19.18	105.50
4.2.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah inovasi yang dikembangkan	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	-	2.00	200.00

RANCANGAN AWAL RKPD 2024				
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	3,232,225.25	Program Kabupaten
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	148,743.92	Per perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	79,992.31	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7	68,751.61	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	2,366,742.67	Administrasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji/tunj	20	2,366,742.67	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	136,259.06	Administrasi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	81	136,259.06	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	235,828.66	Administrasi
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	34,003.14	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	28	11,614.30	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29	190,211.21	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	61,479.52	Perencanaan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	

Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	14	61,479.52	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	117,782.21	Per Dae
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	17,051.47	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	4	100,730.74	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	165,389.22	Pen Pen
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15	87,690.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26	15,200.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	62,499.22	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian target perencanaan pembangunan daerah (persen)	74	638,421.16	Progran Pemban
	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan (persen)	100	130,091.59	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu (persen)	100	509,845.16	Per
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rantek RPJMD/ ranwal RKPD (dokumen)	3	164,657.37	
Koordinasi Penelaahan Dokrenda dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (dokumen)	1	54,532.10	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara Konsultasi Publik	3	45,631.56	

Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD	Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	3	21,545.21	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota (berita acara)	3	40,053.62	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (dokumen)	2	183,425.30	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran (persen)	100	130,091.59	Per Per
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (laporan)	8	130,091.59	
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama	Terkendalnya pelaksanaan kerja sama daerah	-	-	
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Capaian Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah (persen)	100	128,576.00	Imp Bid
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (dokumen)	4	128,576.00	
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% – 100%)	94.58	657,734.10	Program Pembar
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kinerja OPD bidang Pemerintahan dan PM (persen)	95.51	353,009.05	Koc Pen
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah SKPD yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan SKPD (SKPD)	16	24,488.87	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan SKPD Bidang Pemerintahan (laporan)	1	47,955.48	

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	1	86,112.76	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (SKPD)	7	10,713.88	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7	64,283.28	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (laporan)	1	119,454.78	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kinerja OPD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (persen)	95.54	164,171.09	Koc (Su
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (SKPD)	6	9,183.33	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (SKPD)	6	55,099.96	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (laporan)	1	99,887.81	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kinerja OPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)	92.7	140,553.95	Koc Kev
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (SKPD)	6	8,542.66	

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (laporan)	6	51,255.96	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)	1	80,755.33	
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi/p enelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah (persen)	0.63	294,883.69	Program
	Persentase kematangan inovasi (persen)	83.33	285,588.20	
Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase pemenuhan indikator inovasi daerah (persen)	87.01	285,588.20	Per
Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi dibidang difusi, inovasi dan penerapan teknologi (laporan)	1	285,588.20	
Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah penelitian yang dihasilkan (dokumen)	2	294,883.69	Per perr
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik (laporan)	2	294,883.69	

Sumber : Sekretariat Bapelitbangda, 2023

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)
-5	-6	-7	-8
n Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ten/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	3,232,225.25
encanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja angkat daerah	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	148,743.92
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	79,992.31
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7	68,751.61
ministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	2,366,742.67
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji/tunj	20	2,366,742.67
ministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	81	136,259.06
ministrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	235,828.66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	34,003.14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	28	11,614.30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29	190,211.21
igadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan nerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	61,479.52
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-

Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	14	61,479.52
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	–	–
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	117,782.21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	17,051.47
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	4	100,730.74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	165,389.22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15	87,690.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26	15,200.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	62,499.22
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian target perencanaan pembangunan daerah (persen)	74	638,421.16
	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan (persen)	100	130,091.59
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu (persen)	100	509,845.16
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rantek RPJMD/ ranwal RKPD (dokumen)	3	164,657.37
Koordinasi Penelaahan Dokrenda dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (dokumen)	1	54,532.10
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara Konsultasi Publik	3	45,631.56

Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD	Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	3	21,545.21
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota (berita acara)	3	40,053.62
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (dokumen)	2	183,425.30
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran (persen)	100	130,091.59
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (laporan)	8	130,091.59
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama	Terkendalnya pelaksanaan kerja sama daerah	-	-
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Capaian Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah (persen)	100	128,576.00
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (dokumen)	4	128,576.00
Penyusunan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% – 100%)	94.58	657,734.10
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kinerja OPD bidang Pemerintahan dan PM (persen)	95.51	164,433.52
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah SKPD yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan SKPD (SKPD)	0	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan SKPD Bidang Pemerintahan (laporan)	0	0

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	0	0
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia (SKPD)	0	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (laporan)	2	164,433.52
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kinerja OPD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (persen)	95.54	131,546.82
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian (SKPD)	0	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (SKPD)	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (laporan)	1	131,546.82
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kinerja OPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (persen)	92.7	140,553.95
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur (SKPD)	36	230,206.93

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (laporan)	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)	2	131,546.82
n Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi/ penelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah (persen)	0.63	294,883.69
	Persentase kematangan inovasi (persen)	83.33	285,588.20
ngembangan inovasi dan teknologi	Persentase pemenuhan indikator inovasi daerah (persen)	87.01	285,588.20
Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi dibidang difusi, inovasi dan penerapan teknologi (laporan)	1	285,588.20
elitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah penelitian yang dihasilkan (dokumen)	2	294,883.69
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang dikelola dengan baik (laporan)	2	294,883.69

LAMPIRAN 2
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00	3,232,225.25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00	3,232,225.25
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00	148,743.92	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00	148,743.92
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4.00	79,992.31	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4.00	79,992.31
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7.00	68,751.61	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7.00	68,751.61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100.00	2,366,742.67	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100.00	2,366,742.67
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji/tunj ASN	20.00	2,366,742.67	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji/tunj ASN	20.00	2,366,742.67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00	136,259.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00	136,259.06
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	81.00	136,259.06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	81.00	136,259.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100.00	235,828.66	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100.00	235,828.66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7.00	34,003.14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7.00	34,003.14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	28.00	11,614.30	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	28.00	11,614.30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29.00	190,211.21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29.00	190,211.21
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100.00	61,479.52	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100.00	61,479.52
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	14.00	61,479.52	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	14.00	61,479.52
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00	117,782.21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00	117,782.21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4.00	17,051.47	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4.00	17,051.47
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	4.00	100,730.74	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	4.00	100,730.74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00	165,389.22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00	165,389.22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15.00	87,690.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15.00	87,690.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26.00	15,200.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26.00	15,200.00

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1.00	62,499.22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1.00	62,499.22
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian target perencanaan pembangunan daerah (persen)	74.00	638,421.16	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian target perencanaan pembangunan daerah (persen)	74.00	638,421.16
	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan (persen)	100.00	130,091.59		Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan (persen)	100.00	130,091.59
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu (persen)	100.00	509,845.16	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu (persen)	100.00	509,845.16
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rantek RPJMD/ranwal RKPD (dokumen)	3.00	164,657.37	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rantek RPJMD/ranwal RKPD (dokumen)	3.00	164,657.37
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (dokumen)	1.00	54,532.10	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (dokumen)	1.00	54,532.10
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara Konsultasi Publik	3.00	45,631.56	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara Konsultasi Publik	3.00	45,631.56
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	3.00	21,545.21	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	3.00	21,545.21
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota (berita acara)	3.00	40,053.62	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota (berita acara)	3.00	40,053.62
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (dokumen)	2.00	183,425.30	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (dokumen)	2.00	183,425.30
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran (persen)	100.00	130,091.59	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran (persen)	100.00	130,091.59
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (laporan)	8.00	130,091.59	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (laporan)	8.00	130,091.59
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama	Terkendalnya pelaksanaan kerja sama daerah	-	-	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama	Terkendalnya pelaksanaan kerja sama daerah	-	-
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Capaian Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Daerah Bidang Pembangunan Daerah (persen)	100.00	128,576.00	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Capaian Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Daerah Bidang Pembangunan Daerah (persen)	100.00	128,576.00
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (dokumen)	4.00	128,576.00	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (dokumen)	4.00	128,576.00
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%)	94.58	657,734.10	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%)	94.58	657,734.10
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kinerja OPD bidang Pemerintahan dan PM (persen)	95.51	353,009.05	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kinerja OPD bidang Pemerintahan dan PM (persen)	95.51	353,009.05
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah SKPD yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan SKPD (SKPD)	16.00	24,488.87	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah SKPD yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan SKPD (SKPD)	16.00	24,488.87

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan SKPD Bidang Pemerintahan (laporan)	1.00	47,955.48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan SKPD Bidang Pemerintahan (laporan)	1.00	47,955.48
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	1.00	86,112.76	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	1.00	86,112.76
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (SKPD)	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia (SKPD)	7.00	10,713.88	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia (SKPD)	7.00	10,713.88
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7.00	64,283.28	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7.00	64,283.28
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (laporan)	1.00	119,454.78	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (laporan)	1.00	119,454.78
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (nersen)	Persentase Kinerja OPD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (nersen)	95.54	164,171.09	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kinerja OPD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (nersen)	95.54	164,171.09
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian (SKPD)	6.00	9,183.33	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian (SKPD)	6.00	9,183.33
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (SKPD)	6.00	55,099.96	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (SKPD)	6.00	55,099.96
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (laporan)	1.00	99,887.81	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (laporan)	1.00	99,887.81
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kinerja OPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (nersen)	92.70	140,553.95	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kinerja OPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (nersen)	92.70	140,553.95
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur (SKPD)	6.00	8,542.66	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur (SKPD)	6.00	8,542.66
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (laporan)	6.00	51,255.96	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (laporan)	6.00	51,255.96
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)	1.00	80,755.33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)	1.00	80,755.33
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi/penelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah (nersen)	0.63	294,883.69	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi/penelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah (nersen)	0.63	294,883.69
	Persentase kematangan inovasi (nersen)	83.33	285,588.20		Persentase kematangan inovasi (nersen)	83.33	285,588.20

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase pemenuhan indikator inovasi daerah (persen)	87.01	285,588.20	Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase pemenuhan indikator inovasi daerah (persen)	87.01	285,588.20
Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi dibidang difusi, inovasi dan penerapan teknologi (laporan)	1.00	285,588.20	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi dibidang difusi, inovasi dan penerapan teknologi (laporan)	1.00	285,588.20
Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah penelitian yang dihasilkan (dokumen)	2.00	294,883.69	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah penelitian yang dihasilkan (dokumen)	2.00	294,883.69
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang dikelola dengan baik (laporan)	2.00	294,883.69	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang dikelola dengan baik (laporan)	2.00	294,883.69

di SIPD

RANCANGAN RKA SEKRETARIAT BAPELITBANGDA TA. 2024

RENCANA KERJA				PROPORSI BELANJA						
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	ATK	KERTAS/ COVER	MAMI	HONOR	PERJADIN DD	PERJADIN LD	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00	3,232,225.25	32,599.74	19,271.41	90,912.06	#####	-	204,026.17	361,602.61
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00	58,743.92	8,452.73	2,926.75	11,379.47	24,236.19	-	11,748.78	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4.00	25,992.31	7,797.69	2,599.23	10,396.92	-	-	5,198.46	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7.00	32,751.61	655.03	327.52	982.55	24,236.19	-	6,550.32	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100.00	2,366,742.67	-	-	-	2,366,742.67	-	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji/tunj ASN	20.00	2,366,742.67	-	-	-	2,366,742.67	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00	118,259.06	7,095.54	4,730.36	22,469.22	24,834.40	-	59,129.53	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	81.00	118,259.06	7,095.54	4,730.36	22,469.22	24,834.40	-	59,129.53	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100.00	235,828.66	-	11,614.30	57,063.36	-	-	133,147.85	34,003.14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7.00	34,003.14	-	-	-	-	-	-	34,003.14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	28.00	11,614.30	-	11,614.30	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29.00	190,211.21	-	-	57,063.36	-	-	133,147.85	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100.00	61,479.52	-	-	-	-	-	-	61,479.52
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	14.00	61,479.52	-	-	-	-	-	-	61,479.52
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00	225,782.21	17,051.47	-	-	108,000.00	-	-	100,730.74
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4.00	17,051.47	17,051.47	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	4.00	100,730.74	-	-	-	-	-	-	100,730.74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1.00	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00	165,389.22	-	-	-	-	-	-	165,389.22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15.00	87,690.00	-	-	-	-	-	-	87,690.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26.00	15,200.00	-	-	-	-	-	-	15,200.00

RENCANA KERJA				PROPORSI BELANJA						
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	ATK	KERTAS/ COVER	MAMI	HONOR	PERJADIN DD	PERJADIN LD	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1.00	62,499.22	-	-	-	-	-	-	62,499.22